

**PERAN DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BIDANG PARIWISATA
BAHARI KABUPATEN ACEH SELATAN**

TESIS

OLEH

**ZAMZAMI
NPM. 211801029**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/23

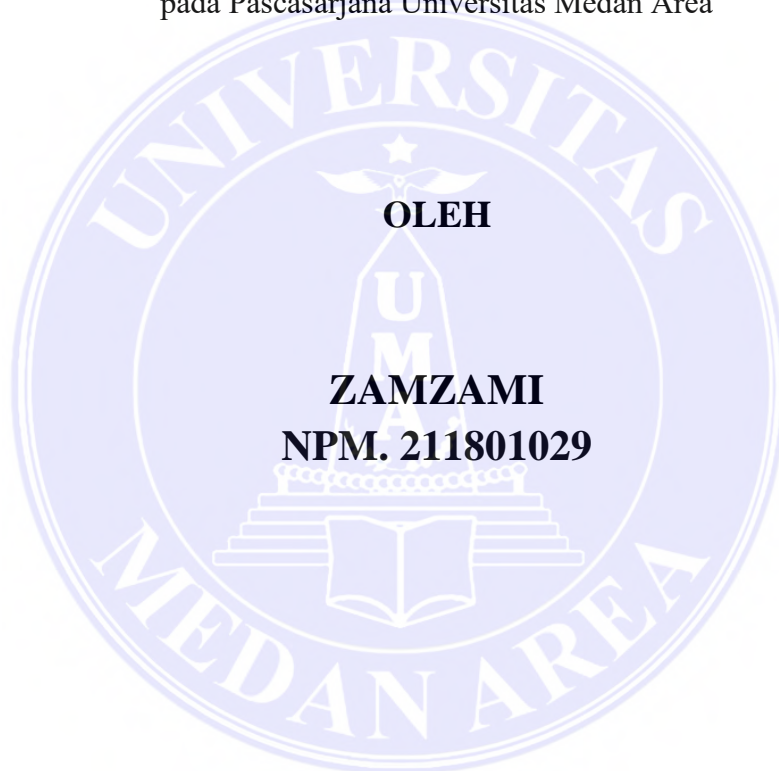
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/23

**PERAN DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BIDANG PARIWISATA
BAHARI KABUPATEN ACEH SELATAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : PERAN DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BIDANG PARIWISATA
BAHARI DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

NAMA : ZAMZAMI

NIM : 211801029

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Budi Hartono, M.SI



Dr. Isnaini, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Dr. Budi Hartono, M.SI

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/23

Telah diuji pada 15 April 2023

Nama : ZAMZAMI

NPM : 211801029



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Nina Siti Salmaniah Srg, M.Si

Sekretaris : Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

Pembimbing I : Dr. Budi Hartono, M.Si

Pembimbing II: Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Adam, MAP

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/23

PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ZAMZAMI
NPM : 211801029
Program Studi : Magister Administrasi Publik

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 02 Maret 2023
Yang menyatakan



ZAMZAMI

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAMZAMI
NPM : 211801029
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusiveRoyalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERAN DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BIDANG PARIWISATA
BAHARI DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

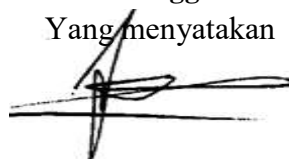
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal :

Yang menyatakan



ZAMZAMI

ABSTRAK

PERAN DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BIDANG PARIWISATA BAHARI KABUPATEN ACEH SELATAN

Nama : Zamzami
NPM : 211801029
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Budi Hartono. M.SI
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam peningkatan asli daerah yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan pemerataan pendapatan yang seadil-seadilnya, kemudian mengambil satu langkah yang tepat yaitu dengan menetapkan kebijakan-kebijakan yang menjurus kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Selatan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah penting menentukan wilayah mana yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dengan segala potensi yang dimiliki melalui sektor Pariwisata Bahari. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas Pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada bidang pariwisata Bahari Kabupaten Aceh Selatan, apa saja hambatan Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada bidang Pariwisata Bahari Kabupaten Aceh Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kawasan pariwisata bahari di Kabupaten Aceh Selatan bertujuan untuk peningkatan pendapatan asli daerah dengan melakukan pengembangan obyek wisata dengan cara memaksimalkan kawasan-kawasan obyek wisata bahari di Kabupaten Aceh Selatan. Adapun hambatan Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada bidang pariwisata Bahari Kabupaten Aceh Selatan antara lain: kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran (dana), belum optimalnya sarana dan prasarana, kurangnya program kemitraan dengan pemerintah dan swasta.

Kata Kunci : *Peran Dinas Pariwisata, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pariwisata Bahari, Kabupaten Aceh Selatan.*

ABSTRACT

THE ROLE OF TOURISM DEPARTMENT IN INCREASING REGIONAL ORIGINAL REVENUE IN MARINE TOURISM, ACEH SELATAN DISTRICT

Name : Zamzami
NPM : 211801029
Study Program : Magister Ilmu Administrasi Publik
Advisor I : Dr. Budi Hartono. M.SI
Advisor II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

One of the efforts that must be made in increasing the original area which aims to increase prosperity and equitable distribution of income, then take the right step, namely by establishing policies that lead to increasing regional original income in South Aceh Regency in accelerating economic growth. To accelerate economic growth in all regions, it is important to determine which areas can support economic growth with all the potential they have through the maritime tourism sector. The formulation of the problem in this study is what is the role of the Tourism Office in increasing regional original income in the marine tourism sector in South Aceh Regency, what are the obstacles to the Tourism Office in increasing Regional Original Revenue in the marine tourism sector in South Aceh Regency. The research method used is a qualitative method, and data analysis techniques use descriptive qualitative. The research results show that the development of marine tourism areas in South Aceh District aims to increase local revenue by developing tourism objects by maximizing marine tourism object areas in South Aceh District. The obstacles to the Tourism Office in increasing Regional Original Income in the marine tourism sector in South Aceh Regency include: lack of public awareness, lack of quality human resources, limited budget (funds), not yet optimal facilities and infrastructure, lack of partnership programs with the government and private.

Keywords: *The Role of the Tourism Office, Increasing Regional Original Income, Maritime Tourism, South Aceh District.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS

Nama : ZAMZAMI
Tempat Tanggal Lahir : Meuligo, 02 Februari 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Kawin
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab/Kota
Alamat : Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan
No. Hp : 0811-3922-87

NAMA ORANG TUA

Ayah : Abdul Gafur (Alm)
Ibu : Daradah
Alamat : Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan

PENDIDIKAN

SD/Sederajat : SD Negeri Meuligo Sawang (2002)
SMP/Sederajat : SMP Negeri 1 Sawang (2005)
SMA/Sederajat : SLTA Negeri 1 Sawang (2008)
Perguruan Tinggi : Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Aceh Banda Aceh (2013)
Perguruan Tinggi : Pascasarjana Universitas Medan Area (2021-2023)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

ZAMZAMI
NPM. 211801029

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan seluruh rahmat dan karunia serta ridho-Nya, yang telah memberi kesehatan dan kesempatan kepada saya untuk dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Bidang Pariwisata Bahari Kabupaten Aceh Selatan”**. Sholawat dan salam saya sanjungkan kepada Nabi Muhammad Rusulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan umat dari zaman jahiliyah ke zaman peradapan yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan dan nikmati sampai saat ini.

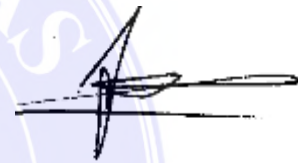
Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengajukan penelitian tesis pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area dan saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian tesis ini dan secara khusus pada kesempatan ini peneliti menyampaikan salam takjim hormat saya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M. Sc, selaku Rektor Unirversitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Kuswardani, MS, Selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Budi Hartono, M. Si, Selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area sekaligus Pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing saya.
4. Ibu Dr. Isnaini, SH, M.Hum, sebagai Pembimbing II yang telah sangat banyak memotivasi dan membantu dalam penulisan tesis ini.

5. Seluruh Dosen Pasca Sarjana Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya, semoga segala bantuan yang diberikan dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah, Aamiin.

Peneliti menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan akan peneliti terima dengan senang hati. Semoga ini dapat menjadi kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan.

Medan, April 2023



ZAMZAMI



UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retno Astuti Kuswardani, MS selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si, selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. Isnaini, SH, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Muchsin, ST, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan, yang telah memberikan izin penelitian dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Mulyadi, SE, Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan, serta para informan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.

8. Orang tua tercinta ayahanda Abdul Gafur dan Ibunda Daradah yang telah berjasa besar dalam perjalanan kehidupan penulis, untuk doa, semangat dan materi yang diberikan.
9. Istri tercinta, Sabrina Rahayu, S.Pd, atas doa, semangat dan dorongan serta pengorbanan yang tulus dalam mendampingi penulis menyelesaikan studi dan tesis ini.
10. Para Pengajar dan staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Medan Area , serta seluruh teman Magister Administrasi Publik yang selalu memberi dukungan dan semangat.

Atas semua ini, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

Penulis



Zamzami

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | |
| HALAMAN JUDUL | |
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG | iii |
| LEMBARAN KONSULTASI TESIS | iv |
| PENGESAHAN CHECK TURNITIN | v |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN | vi |
| MOTTO | vii |
| UCAPAN TERIMAKASIH | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 5 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Teori Peran Pemerintah | 6 |
| 2.1.1 Konsep Peran | 6 |
| 2.1.2 Konsep Pemerintah | 10 |
| 2.1.3 Peran Pemerintah | 13 |
| 2.2 Konsep Pendapatan Asli Daerah | 19 |
| 2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah | 19 |
| 2.2.2 Instrumen Pendapatan Asli Daerah | 22 |
| 2.2.3 Pembiayaan Pembangunan Daerah | 23 |
| 2.2.4 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah | 25 |
| 2.2.5 Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah | 26 |
| 2.2.6 Peran Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah | 27 |
| 2.3 Konsep Pariwisata Bahari | 30 |
| 2.3.1 Pengertian Pariwisata | 30 |
| 2.3.2 Wisatawan | 31 |
| 2.3.3 Wisatawan Domestik | 32 |
| 2.3.4 Wisatawan Alosentris | 32 |
| 2.3.5 Daya Tarik Wisata | 33 |
| 2.3.6 Kawasan Strategi Pariwisata | 34 |
| 2.4 Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Pariwisata | 42 |
| 2.4.1 Peran Dinas Pariwisata | 42 |
| 2.4.2 Mengembangkan Pariwisata | 49 |
| 2.4.3 Faktor Pendorong Pengembangan Pariwisata | 50 |

| | | |
|-------|---|----|
| 2.4.4 | Faktor Penghambat Pengembangan Pariwisata | 52 |
| 2.5 | Penelitian Terdahulu | 55 |
| 2.6 | Kerangka Berpikir Penelitian | 58 |

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

| | | |
|-----|--|----|
| 3.1 | Desain Penelitian | 59 |
| 3.2 | Tempat dan Waktu Penelitian | 60 |
| 3.3 | Subjek / Informan Penelitian | 60 |
| 3.4 | Teknik Pengumpulan Data | 60 |
| 3.5 | Definisi Konsep dan Definisi Operasional | 61 |
| 3.6 | Analisis Data | 64 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | | |
|-------|--|----|
| 4.1 | Profil Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan | 68 |
| 4.2 | Hasil Penelitian | 73 |
| 4.2.1 | Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Bidang Pariwisata Bahari Kabupaten Aceh Selatan | 73 |
| 4.2.2 | Hambatan Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Bidang Pariwisata Bahari Kabupaten Aceh Selatan | 84 |
| 4.2.3 | Keterkaitan Penelitian Dengan Penelitian Terdahulu | 87 |
| 4.3 | Pembahasan | 89 |
| 4.3.1 | Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Bidang Pariwisata Bahari Kabupaten Aceh Selatan | 89 |
| 4.3.2 | Hambatan Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Bidang Pariwisata Bahari Kabupaten Aceh Selatan | 98 |

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

| | | |
|-----|------------------|-----|
| 5.1 | Kesimpulan | 102 |
| 5.2 | Saran | 106 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

FOTO DOKUMENTASI

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ilmu ekonomi mencakup berbagai macam aspek dalam kehidupan bernegara yang dapat menjadi tolak ukur dari kesejahteraan suatu wilayah, salah satunya dari aspek pariwisata yang dapat membantu peningkatan perekonomian baik dari masyarakat secara langsung maupun pemerintahan yang mendukung sektor pariwisata. Suatu wilayah atau daerah harus melihat prinsi-prinsip dasar yang akan dicapai dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemakmuran dan pemerataan pendapatan yang seadil-seadilnya, kemudian mengambil satu langkah yang tepat yaitu dengan menetapkan kebijakan-kebijakan yang menjurus kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada suatu wilayah, dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah penting menentukan wilayah mana yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dengan segala potensi yang dimilikinya yaitu Sektor Pariwisata Bahari. Diharapkan sektor Sektor Pariwisata Bahari dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah dan dimana kita ketahui Sektor Pariwisata Bahari akhir-akhir ini banyak diminati untuk dikembangkan oleh Negara-negara yang memiliki objek wisata yang dapat dijual tidak terkecuali Negara Indonesia khususnya

Kabupaten Aceh Selatan yang memiliki banyak objek wisata terutama wisata alam dan budaya.

Objek wisata yang banyak terdapat di wilayah Kabupaten Aceh Selatan, tentu dapat menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Aceh Selatan. Objek wisata yang terdapat di Kabupaten Tapak Tuan Aceh Selatan memiliki potensi untuk dikembangkan, hal ini disebabkan faktor geografis yang dimiliki, selain itu banyak lagi objek wisata yang terdapat di Kabupaten Aceh Selatan, objek wisata alam, kuliner, sejarah, budaya, dan wisata religius yang dapat dikembangkan. Potensi yang dimiliki Kabupaten Aceh Selatan dapat dikembangkan menjadi wilayah wisata, selain itu hal yang penting yang harus di perhatikan daerah Aceh Selatan memiliki kawasan pantai yang paling indah di seluruh Provinsi Aceh.

Di Kabupaten Aceh Selatan terdapat banyak tempat wisata/obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi, diantaranya: 1. Wisata Tapak Tuan, 2. Gunung Lampu, 3. Puncak Grapela, 4. Puncak Gemilang, 5. Puncak Gunung Mata Angin (Panorama Hatta), 6. Air Terjun Tingkat Tujuh, 7. Pantai Lhok Rukam, 8. Pantai Cemara Ujung Batu Pasieraja, 9. Pemandian Panjupian, 10. Patung Naga, 11. Taman Pala Tapak Tuan, 12. Obyek Wisata Batu Putri Batupang/Termenung, 13. Air Terjun Tangga Seribu, 14. Air Terjun Ceurace Beungkuang, 15. Masjid Istiqomah Tapak Tuan, 16. Pulau Dua Bakongan Timur, 17. Pantai Lhok Nibong, sebelum bencana tsunami adalah tempat yang sangat indah dan menarik. Disepanjang jalan di pinggiran pantai berbaris pohon kelapa dan pohon cemara, banyak terdapat tempat istirahat seperti cafe-café. Pemandangan disore hari sangat

indah, dimana dapat melihat pemandangan matahari tenggelam pada hari senja.

<https://republikwisata.com/tempat-wisata-di-tapak-tuan/>

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan harus memperhatikan aspek-aspek pendukung dalam mengembangkan wilayah objek wisata, seperti fasilitas yang dibutuhkan oleh pengunjung yang ingin berwisata di tempat tersebut, agar wisatawan lebih nyaman dan betah, sebagai mana diharapkan semakin banyak wisatawan yang datang semakin besar pula sumbangan yang di peroleh bagi daerah.

Menurut Nuansa Hasta (2006) bagi daerah, pembangunan pariwisata juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dari jasa hotel, restoran maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang konsumsi. Pendapatan lain adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor, air bersih, pengolahan sampah, parkir dan sebagainya. Seiring berjalan waktu perkembangan wilayah objek wisatapun semakin meningkat, dan itu di ikuti pula oleh banyaknya jumlah wisatawan yang datang.

Mengenai retribusi daerah di dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), Aceh Selatan yang memiliki potensi sumber daya alam dapat memanfaatkan potensi ini sebagai sumber pajak/retribusi daerah yang berupa objek wisata. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menyadari bahwa sektor pariwisata bukanlah penyumbang terbesar pendapatan daerah, tetapi apabila kita memanfaatkannya dengan baik dan mengelolanya dengan serius, bukan tidak mungkin sektor ini dapat menjadi penyumbang terbesar pendapatan asli daerahhal ini didukung oleh potensi alam dan seni budaya yang cukup besar, ditambah lagi dengan adanya visi

Pemerintah Provinsi Aceh dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Oleh sebab itu dalam penelitian ini hanya dibahas kepada Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Bidang Pariwisata Bahari Kabupaten Aceh Selatan. Dari penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul “**PERAN DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BIDANG PARIWISATA BAHARI KABUPATEN ACEH SELATAN**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Bidang Pariwisata Bahari Kabupaten Aceh Selatan?
2. Apa Saja Hambatan Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Bidang Pariwisata Bahari Kabupaten Aceh Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Bidang Pariwisata Bahari Kabupaten Aceh Selatan.

2. Untuk Mendeskripsikan Apa Saja Hambatan Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Bidang Pariwisata Bahari Kabupaten Aceh Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa / mahasiswi Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik dalam melakukan analisa lebih lanjut tentang Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Bidang Pariwisata Bahari Kabupaten Aceh Selatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis diharapkan penelitian ini mampu memberikan penjelasan mengenai Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Bidang Pariwisata Bahari Kabupaten Aceh Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Peran Pemerintah

2.1.1. Konsep Peran

Menurut Biddle dan Thomas dalam bukunya Sarwono (2011:224), peran adalah seperangkat formulasi yang membatasi perilaku yang diharapkan dari pemegang posisi tertentu. Peran memiliki empat istilah, yakni :

a. Harapan tentang Peran adalah asumsi bagi orang lain secara keseluruhan tentang cara berperilaku yang benar, yang harus ditunjukkan oleh seseorang yang memainkan peran tertentu.

b. Norma

Orang sering mengacaukan ungkapan "harapan" dengan "norma". Bagaimanapun, menurut Secord dan Backman (1964) "norma" hanyalah satu jenis "harapan".

c. Wujud perilaku

Variasi dalam teori peran ini dianggap normal dan tidak memiliki batas. Sama halnya dengan teater di mana tidak ada aktor yang identik secara sempurna dalam peran tertentu. Bahkan aktor dapat memainkan peran tertentu dengan cara yang berbeda pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, teori peran cenderung mengelompokkan istilah-istilahnya bukan menurut tindakan tertentu, tetapi menurut klasifikasi menurut asal tindakan dan sifat tujuannya (atau motifnya). Misalnya, bentuk-bentuk perilaku peran dapat dibagi menjadi

beberapa jenis seperti prestasi kerja, prestasi sekolah, prestasi olahraga, disiplin anak, mencari nafkah, dan menjaga ketertiban.

d. Penilaian dan Sanksi

Penilaian dan sanksi sangat sulit dipisahkan dari makna ketika dikaitkan dengan peran. Biddle dan Thomas mengatakan keduanya didasarkan pada ekspektasi normatif masyarakat. Orang menggunakan norma untuk menyampaikan kesan positif atau negatif dari perilaku. Kesan negatif atau positif ini disebut penilaian peran. Sanksi di sisi lain merujuk pada upaya orang untuk mengubah apa yang sebelumnya dianggap negatif menjadi positif dengan mempertahankan nilai-nilai positif atau mengubah karakteristik peran.

Berdasarkan paparan Biddle dan Thomas di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan lebih berpusat di sekitar cara berperilaku dan hubungan individu dalam aktivitas publik di mana kepemilikan pekerjaan tergantung pada tingkat yang lebih besar terhadap situasi individu dalam aktivitas publiknya. Iklim dan perilaku yang ditampilkan selama waktu yang dihabiskan untuk bekerja sama dengan orang lain.

Riyadi (2002:138) menyatakan bahwa peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan masyarakat atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan secara terstruktur, baik norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya. Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam

mengorganisasi. Peran merupakan perangkat perilaku dalam kelompok, baik kecil maupun besar, yang menjalankan berbagai peran. Peran dapat dirumuskan juga sebagai satu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Bagaimana suatu peran dijalankan dipengaruhi oleh kepribadian seseorang. Peran yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah mempunyai peran yang sama.

Menurut Poerwadarminta, (Cahya, 2017:22) peran dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau perkumpulan dalam suatu keadaan atau kesempatan tertentu, dimana cara bertingkah laku yang diselesaikan merupakan suatu kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh orang yang berdomisili atau memiliki situasi tertentu atas permintaan publik. Pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) dibagi menjadi :

1. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok berdasarkan posisinya di dalam kelompok.
2. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan anggota kelompok kepada kelompok, memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran pasif adalah kontribusi pasif oleh anggota kelompok, yang menahan diri dari memberikan fungsi lain dalam kelompok kesempatan untuk berhasil.

Menurut Soekanto, peran adalah proses dinamis status atau kedudukan, menyiratkan kinerja peran ketika menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan peran itu. Perbedaan posisi dan peran saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling bergantung satu sama lain.

Sutarto (2009:138-139) merekomendasikan peran menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Konsep peran, yakni keyakinan individu tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu harapan orang lain tentang bagaimana seseorang dalam posisi tertentu harus berperilaku.
- c. Implementasi peran, yaitu perilaku aktual seseorang pada posisi tertentu

Ketika ketiga unsur tersebut selaras, maka interaksi sosial akan berkelanjutan dan lancar. Berdasarkan pendapat ini, peran dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari individu dalam hubungan sosial tertentu.
- b. Peran adalah pengaruh yang terkait dengan posisi atau kedudukan sosial tertentu.
- c. Peran muncul ketika seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya.
- d. Ada tindakan dan peran yang terjadi ketika diberi kesempatan..

Peran adalah tindakan yang memaksa individu atau organisasi untuk melakukan kegiatannya dengan sebaik-baiknya, berdasarkan tujuan dan kondisi yang disepakati secara umum.

2.1.2 Konsep Pemerintah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintahan dicirikan sebagai suatu proses untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan, atau suatu tata cara untuk menyelesaikan perintah, yang mengawasi yang memerintah. Max Weber (dalam Dahl, 1994) mencirikan pemerintah sebagai apapun yang berlaku sehubungan dengan mendukung klaim bahwa dia memiliki hak selektif untuk menggunakan kekuasaan yang sebenarnya untuk melaksanakan pedomannya dalam batas wilayah tertentu. Soewargono, 1979 dalam (Sumaryadi, 2010:20), mengartikan otoritas publik sebagai pemegang kekuasaan politik, yang sering disebut sebagai penguasa sebagai kepala pemerintahan umum.

Surbakti (1992:167) mengartikan bahwa administrasi (pemerintahan) secara etimologis berasal dari kata Yunani; *Kubernan* atau nahkoda kapal, yang berarti melihat ke depan, memutuskan berbagai strategi yang dijalankan untuk mencapai tujuan Negara - masyarakat, memperkirakan arah kemajuan negara-masyarakat di kemudian hari dan bersiap-siap bergerak untuk memenuhi perbaikan masyarakat sebagai serta mengawasi dan membimbing daerah setempat menuju tujuan yang ideal. Dengan cara ini, kegiatan pemerintah lebih kearah pada penentuan dan menjalankan pilihan politik untuk mencapai tujuan negara bagian lokal.

Ndraha (2003) mencirikan pemerintah sebagai organisasi yang memproses kepuasan kebutuhan manusia sebagai pengguna produk pemerintah dalam administrasi umum dan sipil. Pemerintah (*government*) terbentuk dari pendelegasian kekuasaan rakyat. Sementara pemerintahan (*governance*) mengacu pada kapasitas dan dan spontanitas dari kelompok-kelompok sosial dalam

mengatur dirinya sendiri, mengacu pada metode manajemen. Governance pada tingkat yang lebih besar merupakan kekhasan sosial, dan lebih luas daripada pemerintah (*government*). Pemerintah membutuhkan proses politik. Governance menunjukkan adanya tatanan dan kemampuan sementara *government* menunjuk pada organ. Gagasan tentang *government* mengacu pada organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (pemerintah dan negara). Gagasan *governance* tidak hanya mencakup otoritas pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara sehingga pihak-pihak yang terlibat dan cakupannya lebih luas.

Jum anggraini (2012:14) menyatakan bahwan pemerintah berasal dari kata Yunani “*cratein*”. Dalam bahasa Inggris, istilah pemerintah disebut dengan *Government*, yang berasal dari bahasa Latin “*Gubernaculum*” yang berarti membimbing. *Gubernaculum* di Indonesia diartikan sebagai pemerintah atau pemerintahan. Secara etimologi, pemerintah berasal dari kata dasar “perintah” yang berarti menyuruh untuk melakukan sesuatu sesuatu, aba-aba, atau komando. Pemerintah dari perspektif yang luas adalah kemampuan yang mencakup tindakan, perbuatan dan keputusan oleh perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah (administrasi). Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah organ/badan/perangkat perlengkapan negara yang disertai pemerintahan ataupun tugas-tugas memerintah.

Pemerintah dapat dikatakan sebagai suatu sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara dan bagian-bagiannya. Pemerintah juga diartikan sebagai

sekelompok orang yang secara kolektif memikul tanggung jawab terbatas untuk menjalankan kekuasaan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan tujuan mempercepat terwujudnya kepentingan bersama melalui perbaikan, pelayanan dan pemberdayaan. Pemberdayaan dan partisipasi untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan asas demokrasi, keadilan, keistimewaan, dan ciri khas daerah dalam sistem kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18 ayat 2 dan 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan pemerintahan bersama. Peran pemerintah daerah adalah dalam kegiatan pengelolaan, memberikan informasi, pengetahuan dan edukasi tentang pengelolaan usaha perikanan. Kelembagaan yang dibentuk diharapkan dapat mendorong modal sosial nelayan dan memungkinkan mereka memiliki kekuatan sosial yang lebih besar dalam ekonomi mandiri mereka. Pembinaan dan pendidikan adalah peran kunci bagi pemerintah untuk menciptakan masyarakat nelayan yang lebih mandiri.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintah daerah dan badan perwakilan rakyat daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 14 ayat (1) menyebutkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Namun dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah poin (Y) pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan pada Sub Urusan Perikanan Tangkap, Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota dan Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.1.3 Peran Pemerintah

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan pemerintah yang mempunyai kewenangan yang sangat strategis dan kedudukan yang strategis yang berkaitan dengan fungsinya selaku “pelayanan publik” guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketenteraman bagi masyarakat. Sebab perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kegiatan untuk dilaksanakan dimasa depan, dalam hal ini berawal dari tahapan-tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen didalamnya, demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu (Riyadi & Bratakusamah, 2004: 8). Dalam pengertian ini,

pemerintah daerah sebagai peran perencana untuk mendesain dan membentuk interaksi dalam suatu proses menuju sasaran yang ingin dicapai. Pemerintah harus berperan utama dengan tugas pokok dan fungsinya dan menyesuaikan dengan fungsi visi, misi, sasaran dan tujuan yang terapkan.

Menurut arif (Muhardi, dkk, 2014:69) Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu:

1. Peran pemerintah sebagai regulator, yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberi acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dimasyarakat.
2. Pemerintah sebagai dinamisator, yaitu menggerakkan partisipasi multi pihak saat stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.
3. Pemerintah sebagai fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan

aman termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan atau permodalan.

4. Pemerintah sebagai katalisator, yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi

Ndraha (1987:110) berpendapat bahwa peran pemerintah dalam pembangunan masyarakat sangat luas, mulai dari pelayanan operasional hingga ideologis dan spiritual, peran pemerintah yang otoritatif dan kemampuan pemimpin untuk melaksanakannya sangat menentukan. Karena tuntutan dari tugas pokok dan fungsinya sendiri bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dilingkungan masyarakat maupun pemerintah.

Rasyid (2000:48) mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik senantiasa didasarkan pada usaha-usaha pokok dan kemampuan-kemampuan yang dikelola dengan pedoman-pedoman yang direkomendasikan dan pelaksanaan tugas dan kemampuan dasar itu bergantung pada pemimpin itu sendiri. Dalam hal ini, kegiatan yang harus dilakukan/diselesaikan memiliki tiga kemampuan mendasar, tepatnya: pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Dalam hubungan ini ditegaskan bahwa pelayanan yang baik akan memberikan keadilan bagi masyarakat, bangsa dan negara, sedangkan pemberdayaan adalah untuk mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat.

Tugas pemerintah daerah dalam peningkatan daerah adalah suatu pemerintahan yang mempunyai kekuatan vital dan kedudukan penting, hal ini

berkaitan dengan kemampuannya sebagai bantuan masyarakat untuk lebih mengembangkan bantuan pemerintah, keamanan, pemerataan, keberhasilan dan kerukunan bagi daerah (Hayat dkk., 2018)

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi daerah menurut (Arsyad Lincolin ,2000)) adalah :

1. Pelaku usaha (*Entrepreneur*), yaitu pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha.
2. Koordinator, yang mengatur regulasi dan mengusulkan strategi dalam pembangunan.
3. Fasilitator sarana dan prasarana.
4. Stimulator, penggerak dalam peningkatan usaha melalui tindakan.

Davey (2011:21) menyatakan bahwa ada lima fungsi utama pemerintahan, yaitu :

1. Fungsi penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya.
2. Fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan.
3. Fungsi pembangunan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi.
4. Fungsi perwakilan, yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka.

5. Fungsi koordinasi, yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan.

Menurut Siagian (2012: 128), fungsi utama pemerintahan negara adalah pengaturan dan pelayanan. Fungsi regulasi biasanya dikaitkan dengan karakter negara modern sebagai negara hukum, dan fungsi pelayanan dengan karakter negara sebagai negara kesejahteraan. Di sini jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya pemerintah untuk mengatur dan mengontrol masyarakat, dengan tujuan menegakkan hukum dan membawa kemakmuran bagi warganya.

Peran pemerintah dalam pembangunan nasional digambarkan lebih jelas dan rinci oleh Siagian (2012:142-150). Bahwa pemerintah memainkan peran dominan dalam proses pembangunan. Peran yang ditekankan adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri .

- a. Stabilisator, kiprah pemerintah merupakan mewujudkan perubahan tanpa berubah sebagai suatu gejolak sosial, yang bisa menjadi ancaman bagi keutuhan nasional dan kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut bisa terwujud dengan cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses pengenalan yang elegan namun efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang sedikit demi sedikit namun berkesinambungan
- b. Inovator, dalam menjalankan perannya sebagai inovator, seluruh pemerintah harus menjadi sumber inovasi. Oleh karena itu, kondisi yang harus dipenuhi oleh suatu negara agar dapat menjalankan perannya secara efektif memerlukan tingkat legitimasi yang tinggi. Misalnya, pemerintah yang "memenangkan"

perebutan kekuasaan atau memenangkan pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil dengan sedikit legitimasi akan kesulitan untuk membawa inovasinya ke publik. Tiga hal yang harus benar-benar diperhatikan adalah penerapan inovasi pertama yang dilakukan dalam lingkungan birokrasi, inovasi konseptual, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

- c. Modernisator, melalui pembangunan setiap negara ingin berubah menjadi negara yang kuat, mandiri dan diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki sehingga mempunyai nilai tambah yang tinggi. Sistem pendidikan nasional yang tangguh, yang membentuk masyarakat yang produktif, landasan kehidupan politik yang kokoh dan demokratis, mempunyai visi yang jelas mengenai masa depan yang diinginkan sebagai orientasi.
- d. Pelopor, selaku pelopor pemerintah wajib sebagai panutan (*role model*) bagi semua rakyat. Pelopor pada bentuk hal-hal positif misalnya kepeloporan pada bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan pada penegakan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan pada kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, serta kepeloporan pada berkorban demi kepentingan negara.
- e. Pelaksana sendiri, meskipun jelas pelaksanaan pembangunan adalah tanggung jawab nasional, bukan sebagai beban pemerintah semata, dengan beberapa pertimbangan misalnya keselamatan negara, kapital terbatas, kemampuan yang belum memadai, tidak diminati rakyat dan secara konstitusional adalah tugas pemerintah, sangat mungkin masih banyak aktivitas yang tidak dapat

diserahkan pada pihak swasta tetapi wajib dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan contoh mentalitas, nilai-nilai dan tujuan yang diharapkan dari seorang individu berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sedangkan posisi adalah status atau tempat individu dalam kerangka sosial dan merupakan tanda dan realisasi diri. Peran dicirikan juga sebagai perkembangan perilaku yang diharapkan oleh iklim sosial terkait dengan pekerjaan orang-orang dalam pertemuan yang berbeda.

2.2 Konsep Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldric, 2017: 23)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017: 119).

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017: 2).

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber objek pajak atau menjangkau wajib pajak baru (Carunia, 2017: 30)

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Berdasarkan teori dapat diketahui pendapatan asli daerah merupakan sumber-sumber penerimaan yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yang dananya digunakan dalam membiayai pembangunan daerah. Adapun sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Pajak daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 1 menerangkan bahwa pajak daerah terdiri dari:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran dari rumah makan
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan
7. Pajak pemanfaatan air bawah tanah.

Setelah berakhirnya era booming minyak di akhir tahun 1970 atau awal tahun 1980 pemerintah mulai mendorong dan meningkatkan penerimaan non migas. penerimaan yang telah banyak menghasilkan devisa setelah era minyak bumi dan gas adalah bidang hasil hutan serta industry tekstil, namun sejalan dengan kampanye lingkungan hidup pembabatan hutan yang tidak terkendali mendapat reaksi keras dari masyarakat internasional sehingga menyebabkan sumber keuangan menurun drastis. Kondisi yang menyebabkan sumber keuangan menurun drastic menyebabkan pemerintah beralih kepada sumber keuangan yaitu perpajakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pajak yang merupakan sumber keuangan pemerintah salah satunya adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah yang bersangkutan (Carunia, 2017: 87). 15 2)

2. Retribusi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hokum. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa tau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan (Carunia, 2017: 85-88). Ciri-ciri retribusi daerah:

- a) Retribusi di pungut oleh pemerintah daerah
- b) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d) Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengayam jasa-jasa yang disiapkan negara.

2.2.2 Instrument Pendapatan Asli Daerah

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah di satu pihak dalam rangka mendukung kebijakan makro nasional yang bersifat strategis dan di lain pihak dengan desentralisasi kewenangan pemerintahan ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Selain itu otonomi daerah mempunyai tujuan:

- a. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif yang kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah.
- b. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai.
- d. Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah berlandaskan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah (Carunia, 2017: 19).

2.2.3 Pembiayaan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengolah sumber daya alam yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan perkembangan kegiatan ekonomi (Pertumbuhan ekonomi) di suatu wilayah.

Pada hakekatnya inti dari teori pertumbuhan dan pembangunan daerah berkaitan pada dua hal yaitu pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Ada beberapa teori untuk menganalisis pembangunan ekonomi suatu daerah, **pertama teori basis ekonomi**, teori ini menyatakan bahwa factor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan suatu barang dan jasa dari luar daerah. Proses produksi dari industry di suatu daerah

yang menggunakan sumber daya produksi local termasuk tenaga kerja dan bahan baku dan outputnya di ekspor dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita melalui penciptaan peluang kerja di daerah tersebut. **Kedua adalah teori kawasan**, teori ini sering digunakan untuk penentuan atau pengembangan kawasan yang dianggap paling tepat disuatu daerah. **Ketiga yaitu teori daya Tarik industry**, dalam upaya pembangunan ekonomi daerah di Indonesia sering dipertanyakan jenis-jenis industri apa saja yang tepat untuk dikembangkan di suatu daerah (Carunia, 2017: 21).

Pembangunan daerah dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Jika sarana dan prasarana yang dimiliki daerah memadai maka masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-harinya dengan nyaman dan aman yang akan berpengaruh pada meningkatnya produktivitas yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut, dengan bertambahnya belanja pembangunan maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan akan meningkatkan pendapatan asli daerah (Jolianis, 2012).

Pembangunan daerah dapat diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dengan menggunakan pendapatan per kapita atau produk domestic regional bruto (PDRB). Produk domestic regional bruto adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah, PDRB merupakan indicator yang memberikan gambaran tentang keadaan ekonomi suatu wilayah, ada tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu:

- a. PDRB menurut pendekatan produksi Merupakan jumlah nilai barang atau jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.
- b. PDRB menurut pendekatan pendapatan Merupakan balas jasa yang digunakan oleh factor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu.
- c. PDRB menurut pendekatan pengeluaran Merupakan semua komponen pengeluaran akhir seperti, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, ppperubahan stok dan ekspor neto dalam jangka waktu tertentu.

Indikator pengukur keberhasilan pembangunan daerah bias berbeda untuk setiap negara, sejumlah indicator yang digunakan oleh lembaga lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (GNP dan PDRB) , struktur perekonomian, urbanisasi, dan jumlah tabungan.

2.2.4 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum pendapatan asli daerah dalam undang- undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan undang- undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pengertian pendapatan asli daerah terdapat dalam pasal 1 undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu tentang pendapatan asli daerah, yang selanjutnya disebut dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan.

2.2.5 Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Salah satu dari pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah, dana- dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah, dan juga merupakan alat memasukan uang sebanyak-banyaknya di kas daerah guna untuk menunjang pelaksanaan pembangunan serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dari hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang menangani atau diberi tugas untuk mengantar hal tersebut.

Sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah di dalam pelaksanaan otonomi daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber di luar pendapatan daerah , karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan insiatif daerah sedangkn bentuk pemberian pemerintah (PAD) sifatnya lebih terikat. Adanya peningkatan pendapatan asli daerah di harapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

Kebijakan keuangan daerah di bentuk untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhanya. Guna memperkecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. pendapatan asli daerah sendiri dianggap sebagai arternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan

pengeluaran yang di tentukan oleh daerah kususnya keperluan rutin, oleh karena itu peningkatan hasil pendapatan asli daerah sangat diharapkan oleh setiap daerah.

2.2.6 Peran Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah merupakan salah satu pendapatan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan sumber murni penerimaan daerah yang selalu diharapkan peningkatannya. Manfaat yang dapat diberikan sektor pariwisata adalah :

- a. Memenuhi pemasukan dan pendapatan baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Penambahan ini bisa dilihat dari meningkatnya pendapatan dari kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat, berupa penginapan, restoran, dan rumah makan, pramuwisata, biro perjalanan, dan penyediaan cindaramata. Bagi daerah sendiri kegiatan usaha tersebut merupakan potensi dalam menggali PAD, sehingga perekonomian daerah dapat ditingkatkan .
- b. Membuka kesempatan kerja , industry pariwisata merupakan kegiatan mata rantai yang sangat panjang, sehingga banyak membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah tersebut.
- c. Menambah devisa Negara, dengan makin bnayaknya wisatawan yang dating, maka makin banyak devisa yang akan diperoleh.
- d. Merangsang pertumbuhan kebudayaan asli, serta menunjang gerak pembangunan daerah.

Industry pariwisata di Indonesia dinilai sebagai sektor andalan penyumbang devisa Negara terbesar dibidang nonmigas. Terlebih ketika pemerintah Indonesia

merancang program otonomi daerah, maka industry pariwisata merupakan salah satu alternative yang akan dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan daerah. Merupakan salah satu langkah yang baik jika industry pariwisata dipergunakan oleh daerah-daerah di Indonesia yang miskin akan sumber daya alam sebagai suatu sarana untuk meningkatkan PAD.

Namun sebagai konsenkuensinya, daerah-daerah tersebut harus melakukan pengembangan-pengembangan terhadap potensi pariwisata masing-masing daerah dengan mencari dan menciptakan peluang - peluang baru terhadap produk-produk pariwisata yang diunggulkan. yang perlu mendapat perhatian bahwa pengembangan industry pariwisata daerah terkait dengan berbagai faktor yang mau tidak mau berpengaruh dalam perkembangannya.

Oleh karena itu perlu diketahui dan dipahami apa saja faktor yang sesuai dengan faktual memegang peranan penting dalam pengembangan industry pariwisata daerah krusunya dalam rangka penerapan otonomi daerah, sehingga pada akhirnya pengembangan industry pariwisata daerah mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan PAD dan mendorong pembangunan Daerah.

Industry pariwisata merupakan suatu komonditi prospektif yang diapndang mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional. Sehingga tidak mengherankan apabila Indonesia menaruh perhatian kusus terhadap industry pariwisata. Hal ini lebih diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa Indonesia memiliki potensi alam dan kebudayaan yang cukup besar yang dapat dijadikan modal bagi pengembangan kepariwisataan di Indonesia adalah untuk

meningkatkan pendapatan devisa khususnya dan pendapatan Negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industry sampingan lainnya.

Pada dasarnya pengembangan industry pariwisata suatu daerah berkaitan erat dengan pembangunan perekonomian daerah tersebut. Dampak positif yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat daerah setempat adalah perluasan lapangan kerja secara regional. Ini merupakan akibat dari industry pariwisata yang berkembang baik. Misalnya, dengan dibangunnya sarana dan prasarana di daerah tersebut maka tenaga kerja akan banyak tersedot dalam proyek-proyek seperti pembangkit tenaga listrik, jembatan, perhotelan, dan lain sebagainya.

Pariwisata syariah biasa disebut juga pariwisata halal saat ini merupakan salah satu destinasi wisata yang sedang mendunia, pariwisata ini tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim akan tetapi non-muslim juga dapat menikmatinya. Wisata halal di Indonesia masih minim keberadaannya khususnya di kabupaten pesisir barat. Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang wisata halal bahkan masih terdengar asing.

Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif mengatakan bahwa ada 13 provinsi yang berpotensi untuk mengembangkan wisata halal salah satunya provinsi lampung. Wisata halal memberikan ketenangan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan muslim dan non-muslim khususnya para wisatawan yang berkunjung dengan keluarganya. Konsep pariwisata halal ini memerlukan beberapa hal antara lain adanya ketersediaan makanan halal, minuman, fasilitas

beribadah yang memadai dan adanya pembatasan aktivitas yang tidak sesuai dengan syariah dilokasi wisata. Pariwisata halal bersifat universal dalam memasarkan produk dan jasanya., tidak hanya masyarakat muslim yang dapat menikmati akan tetapi masyarakat non-muslim pun dapat menikmati produk dan jasa yang telah ditawarkan.

2.3 Konsep Pariwisata Bahari

2.3.1 Pengertian Pariwisata

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan: Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Pengertian Pariwisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan “

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Pengertian wisata yang terdapat di UU No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan adalah Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Sedangkan menurut World Tourism Organization, Pariwisata atau Tourism merupakan the activities of persons travelling to and staying in places outside

their usual environment for leisure, business and other purposes atau kegiatan seseorang berpergian dan tinggal ke suatu tempat diluar lingkungan yang biasa mereka tempati untuk bersenang-senang, bisnis, dan tujuan lainnya.

Melihat beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan kegiatan yang dilakukan orang atau kelompok dengan melakukan perjalanan yang berpindah dari tempat tinggal ke tempat lain dan tinggal dalam kurun waktu yang tidak lama dengan tujuan bersenang-senang, bisnis, dan tujuan lainnya. Kata kunci dari pengertian ini adalah berpindah, melakukan perjalanan, bersenang-senang dan menetap dalam kurun waktu yang tidak lama.

2.3.2 Wisatawan

Pengertian mengenai wisatawan memiliki banyak penafsiran. Selain pengertian dari wisatawan merupakan orang yang melakukan wisata (UU No 10 Th 2009 Tentang Kepariwisata). Menurut Pitana dan Gayatri (2005: 43) yang menyatakan “ batasan mengenai wisatawan juga sangat bervariasi, mulai dari umum sampai dengan yang sangat teknis spesifik”. United Conference on Travel and Tourism di Roma (1963) memberikan batasan yang lebih umum, tetapi menggunakan istilah „visitor’ (pengunjung), yaitu setiap orang yang mengunjungi negara yang bukan merupakan tempat tinggalnya, untuk berbagi tujuan, tetapi pekerjaan atau penghidupan dari negara yang dikunjungi.

Menurut Medlik (1993: 167) yang menyatakan bahwa wisatawan atau tourist merupakan seseorang yang mengunjungi suatu tempat tidak kurang dari satu malam dan memiliki salah satu tujuan utama berkunjung berdasarkan tiga hal

berikut, yaitu bersenang-senang atau berlibur, bisnis, dan tujuan berwisata lainnya. Berdasarkan asal atau tempat tinggal wisatawan, wisatawan dapat dikategorikan menjadi wisatawan domestik (*domestic tourist*) dan wisatawan mancanegara (*international tourist*).

2.3.3 Wisatawan Domestik

Wisatawan domestik adalah wisatawan yang berkunjung ke tempat tujuan wisata yang masih berada di dalam wilayah negara asalnya. Sedangkan wisatawan mancanegara adalah wisatawan yang berkunjung ke tempat tujuan wisata yang berada di luar wilayah negara asalnya. Berdasarkan jangka waktu kunjungan, wisatawan dikategorikan menjadi wisatawan (*tourist*) dan pengunjung (*visitor*). *Tourist* yaitu mereka yang mengunjungi daerah tujuan wisata lebih dari 24 jam.

Sedangkan *visitor* adalah mereka yang mengunjungi tujuan wisata kurang dari 24 jam. Dalam melakukan perjalanannya seorang wisatawan akan dipengaruhi oleh beberapa hal, yang nantinya akan membentuk karakteristik wisatawan tersebut. Morley mengatakan, permintaan akan pariwisata tergantung pada ciri-ciri wisatawan, seperti penghasilan, umur, motivasi, dan watak. Ciri-ciri ini masing-masing akan mempengaruhi kecenderungan orang untuk berpergian mencari kesenangan. Di Amerika Serikat Plog (1972) mengemukakan teori kepribadian perilaku pariwisata yang terdiri atas dua dimensi kepribadian yang mendasar: *alosenstrisme* dan *psikosentrisme*.

2.3.4 Wisatawan Alosentris

Wisatawan *alosenstris* yaitu wisatawan yang ingin mengunjungi tempat-tempat yang belum diketahui, bersifat petualangan (*adventure*), dan

memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat lokal. Sedangkan wisatawan psikosentris yaitu wisatawan yang hanya mau mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah mempunyai fasilitas dengan standar yang sama dengan di negaranya sendiri. Mereka melakukan perjalanan wisata dengan program wisata dengan program yang pasti, dan memanfaatkan fasilitas dengan standar internasional.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian dari wisatawan, yaitu seseorang yang melakukan perjalanan wisata lebih dari satu malam baik mengunjungi tempat tujuan wisata baik yang berada di dalam atau di luar negara wisatawan dengan tujuan untuk bersenangsenang, bisnis maupun tujuan wisata lainnya.

2.3.5 Daya Tarik Wisata

Daya Tarik Wisata Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata "Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan". Menurut Medlik (1993: 168), yang menyatakan bahwa daya tarik wisata atau Tourist/ Visitor Attractions merupakan elemen dari produk wisata yang menarik pengunjung dan menetapkan pilihannya untuk berkunjung ke tempat tersebut daripada ke tempat lainnya. Indikator yang mendasar diantaranya adalah daya tarik sebuah situs (iklim, keindahan alam, sejarah) di mana tempat itu sendiri yang mempengaruhi pilihan pengunjung dan daya tarik sebuah kegiatan (festival, event olahraga, pameran) yang menjadi daya

tarik utama pengunjung dibandingkan dengan tempat itu sendiri, juga gabungan dari keduanya yang menentukan pilihan wisatawan untuk berkunjung. Indikator lainnya adalah daya tarik yang alami dan buatan seperti pantai dan kota bersejarah.

Sedangkan (Soewarno Darsoprajitno, 2002) menyatakan bahwa di mana saja unsur wisata selalu sama, tetapi sesuai dengan kedudukan geografinya di permukaan bumi tidak ada satu pun tata alam atau bentukan alam yang sama dibelahan bumi lainnya. Demikian pula masyarakat, atau binaannya. Perbedaan inilah yang selalu merangsang orang atau kelompok untuk melakukan kegiatan wisata. Rangsangan atau daya tarik yang kemudian dikembangkan untuk kepentingan kepariwisataan inilah kemudian disebut sebagai daya tarik wisata. Maka dapat diambil kesimpulan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang ada di muka bumi baik buatan atau alami yang memiliki keunikan tersendiri dan menarik orang atau kelompok untuk berkunjung dan menetapkan pilihannya sebagai tempat tujuan untuk melakukan kegiatan wisata.

2.3.6 Kawasan Strategis Pariwisata

Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan (UU No. 10 tahun 2009 Bab I Pasal 1 poin 10).

2.3.7 Wisata Bahari

Berdasarkan Fandeli (1995: 89) wisata bahari adalah “Wisata yang berupa kegiatan berenang, snorkeling, menyelam, berlayar, berselancar, memancing, 12 berjemur, rekreasi pantai, fisiografi bawah air, dan lain-lain”. “Wisata bahari dapat juga diartikan sebagai wisata yang objek dan daya tariknya bersumber dari bentang laut (seascape) maupun bentang darat pantai (*coastal seascape*)”.

2.3.8 Wisata Ekologi

Wisata Ekologi Wisata ke atau mengunjungi kawasan alamiah yang relatif tak terganggu, dengan niat betuk-betul objektif untuk melihat, mempelajari, mengagumi wajah keindahan alam, flora, fauna, termasuk aspek budaya baik di masa lampau maupun sekarang yang mungkin terdapat di kawasan tersebut (Pendit (2003:147)).

2.3.9 Wisata Budaya

Wisata budaya adalah wisata yang objeknya termasuk ke dalam daya tarik budaya contohnya peninggalan sejarah kepurbakalaan dan monumen, museum dan fasilitas budaya lainnya, pola kehidupan, desa wisata, wisata keagamaan, etnis dan nostalgia (Yoeti, 1996).

2.3.10 Wisata Minat Khusus (*Special Interest Tourism*)

Menurut Medlik (1993: 154) yang mengungkapkan bahwa wisata minat khusus merupakan sebuah istilah umum berlibur bagi wisatawan yang memiliki minat yang khusus, seperti seni, pendidikan, kegemaran, olah raga dan kegiatan alam terbuka. Hal ini merupakan salah satu segmentasi pasar pariwisata yang berkembang pesat sekarang ini, dengan dibantu dengan banyaknya penyedia

fasilitas yang benar-benar ahli dibidang ini. Dapat dikatakan wisata minat khusus merupakan segmentasi dari pariwisata yang berusaha untuk menyediakan kebutuhan dari wisatawan tersebut. dengan demikian wisata minat khusus dapat diartikan sebagai wisata yang menyediakan fasilitas pendukung bagi wisatawan yang memiliki ketertarikan khusus seperti seni, olahraga, pendidikan, kegemaran, dan kegiatan alam terbuka.

2.3.11 Pengertian Rekreasi

Rekreasi itu sendiri merupakan kegiatan (bahkan kegiatan itu direncanakan) dan dilaksanakan karena seseorang ingin melaksanakan. Jadi dapat diartikan usaha atau kegiatan yang dilaksanakan pada waktu senggang untuk mengembalikan kesegaran fisik (Clawson dan Knetsch, 1966 dalam Basuni dan Sudargo, 1988). Basuni dan Soedargo (1988), menambahkan kegiatan rekreasi dapat dibedakan menurut sifatnya yaitu rekreasi aktif dan rekreasi pasif. Rekreasi aktif adalah rekreasi yang lebih berorientasi pada manfaat fisik daripada mental, sedang rekreasi pasif adalah rekreasi yang berorientasi pada manfaat mental dari pada fisik. Menurut Direktorat Perlindungan dan Pelestarian Alam (1979) dalam Hemawan (1983) bahwa rekreasi alam atau wisata alam merupakan salah satu bagian dari kebutuhan hidup manusia yang khas dipenuhi untuk memberikan keseimbangan, keserasian, ketenangan dan kegairahan hidup, dimana rekreasi alam atau wisata alam adalah salah satu bentuk pemanfaatan sumberdaya alam yang berlandaskan atas prinsip kelestarian alam.

2.3.12 Pengertian Fasilitas

Fasilitas adalah sarana untuk memudahkan fungsi kemudahan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Sarana Pariwisata adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung atau tidak langsung dan hidup serta kehidupannya banyak tergantung pada kedatangan wisatawan, contohnya : 1. Hotel 2. Restoran 3. Spa 4. Gift Shop 5. Sport Center.

1.3.13 Pra Sarana Pariwisata

Pra Sarana Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan pada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam. (Pendit; 2003:249). Contohnya : 1. Bandara 2. Jalan 3. SPBU 4. PAM 5. Sumber Tenaga Listrik.

1.3.14 Pantai Pasir Padi

Pantai Pasir Padi terletak di Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang sekitar 7 km dari pusat kota ke arah timur dan berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan. Salah satu keunikan pantai yang memiliki garis pantai sepanjang 100 hingga 300 meter ini, adalah struktur pantainya yang landai hingga jauh ke tengah. Ombaknya tenang dan kontur pasir padat putih dan halus. Oleh sebab itu, pantai ini nyaman untuk pejalan kaki bahkan dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat maupun roda dua. Pemandangan alam sekitarnya sangat indah. Tidak jauh dari bibir pantai terdapat Pulau Punai, yang dapat kita kunjungi dengan berjalan kaki di waktu pagi hari, ketika air laut pada umumnya surut. Di pantai ini selain berenang, para wisatawan juga bisa berlayar menuju dua

pulau kecil yang terletak sekitar 2,5 km dari bibir pantai dengan menggunakan perahu-perahu layar milik nelayan. Dua Pulau tersebut yaitu; Pulau Panjang dan Pulau Semujur. Di Pulau Panjang kita bisa melihat kesibukan para keluarga nelayan serta membeli dan menikmati hasil tangkapan mereka seperti; ikan, kepiting, dan sebagainya. Lain halnya di Pulau Semujur, sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni.

1.3.15 Konsep Pengembangan

Pengertian Pengembangan Menurut Musanef (1996) pengembangan adalah segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua prasarana dan sarana, barang dan jasa, fasilitas yang diperlukan, guna melayani kebutuhan wisatawan. segala kegiatan dan pengembangan pariwisata mencakup segi-segi yang amat luas dan menyangkut berbagai segi kehidupan dalam masyarakat, mulai dari kegiatan angkutan, akomodasi, atraksi wisata, makanan dan minuman, cinderamata, pelayanan, suasana kenyamanan.

1.3.16 Kriteria-Kriteria Pengembangan Kawasan Wisata (Resort)

Menurut Grandy, kriteria-kriteria pengembangan kawasan wisata (*resort*), yaitu; suatu kegiatan membangun resort harus melalui suatu konsultasi dengan masyarakat, apa yang direncanakan pengembang harus diterima oleh mereka. Kemudian tiap keuntungan yang diperoleh dari pembangunan, pengembang harus mengembalikan lagi keuntungan tersebut pada masyarakat. Tapi bukan berupa cash money melainkan berupa bangunan yang berguna bagi masyarakat. Selain itu, resort harus lebih mengutamakan lingkungan. Jadi dalam pembangunan suatu

resort tidak boleh meninggalkan sifat-sifat/ kebudayaan setempat. Justru hal tersebut harus dijadikan brand image atau kesan untuk menarik para wisatawan.

Dan dengan pembangunan resort tersebut jangan sampai masyarakat setempat merasa tersisihkan. Jumlah wisatawan yang datang ke suatu resort jangan dijadikan kunci untuk keberhasilan. Karena semakin banyak wisatawan yang datang, dapat semakin merusak lingkungan. Ada 4 tipe empasan yaitu tipe melimpah (*pilling*), tipe menunjam (*plunging*), tipe meluruh (*collapsing*), dan tipe menggelora (*surging*). Untuk kepentingan wisata bahari ada 2 tipe empasan yang perlu diperhatikan, yaitu tipe melimpah dan tipe menunjam. Tipe melimpah memudahkan wisatawan untuk melakukan kegiatan berperahu, memancing ataupun menikmati keindahan bawah laut. Tipe menunjam sangat potensial untuk kegiatan selancar, Karena hanya tipe ini yang mampu menyajikan atraksi yang menarik dalam berselancar. b. Arus Laut Arus laut merupakan aliran laut yang umumnya diakibatkan oleh induksi gelombang atau pasang surut.

Ada 3 macam arus tepi pantai yang perlu diperhatikan, yaitu arus susur pantai, arus sibak (*rip current*), dan arus bawah (*undertow*). Arus sibak seringkali menjadi pertimbangan tertentu bagi para perenang, peselancar, ataupun nelayan. Bagi perenang di perairan pantai, arus sibak perlu dihindari, karena arus ini dapat menyeret perenang ke laut lepas yang dalam, sehingga dapat terjadi kecelakaan yang mematikan. Sebaliknya, bagi para peselancar, arus sibak dicari untuk memudahkan peselancar mencapai gelombang pecah. c. Bentuk Pantai Berdasarkan klarifikasi pantai dari Shepard (Snead, 1982), bentuk-bentuk pantai secara alami dapat dibedakan menjadi pantai primer dan pantai sekunder. Pantai

primer adalah pantai yang morfologinya lebih dipengaruhi oleh proses-proses terrestrial seperti erosi, deposisi, vulkanisme, dan diastrofisme daripada proses marin dan organisme.

Pantai sekunder merupakan pantai yang morfologinya terutama dipengaruhi oleh proses marin dan organisme. Pantai primer dapat dibedakan menjadi 4 kelas yaitu (1) pantai erosi daratan, (2) pantai pengendapan dari darat, (3) panta gunung api, dan (4) pantai struktural. Pantai sekunder dapat dibedakan menjadi 3 kelas yaitu (1) pantai erosi gelombang, (2) pantai pengendapan dari laut, (3) pantai bentukan organisme. d. Bentuk Butir Pasir Bentuk butir pasir dapat dibedakan berdasarkan kebulatannya (sphericity), kebundarannya (roundness), dan keterpilahannya (sorting). Untuk kepentingan wisata bahari, bentuk pasir sangat berpengaruh. Semakin bulat bentuknya (high sphericity), pasir pantai semakin nyaman untuk wisata bahari. Semakin bundar bentuknya (well-rounded), pasir pantai itu semakin nyaman untuk wisata bahari. Pasir pantai yang semakin tinggi tingkat keterpilahannya (very well sorted), semakin nyaman bagi wisatawan pantai.

Pengembangan Pantai sebagai Area Wisata Menurut Fandeli, ada 2 (dua) aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan pantai sebagai area wisata yaitu: a. Pelestarian aspek ekologi Pantai dengan garis pantainya merupakan areal yang sangat sesuai dengan wisata alam. Namun kondisinya sangat rentan. Oleh karena pantai sangat rentan terhadap perubahan atau kemerosotan kualitas lingkungan yang terjadi di perairan dan di daratan, maka penetapan untuk aktivitas wisata harus hati-hati. Penetapan daya dukung

lingkungan pantai yang menjadi dalam menentukan jumlah pengunjung. Daya dukung ini berbeda-beda sangat tergantung pada macam pantai (muddy, sandy atau rocky beach). Bentuk pantai yang berbeda akan berbeda pula kemampuan menerima pengaruh dari wisatawan. Demikian pula faktor aktivitas, wisatawan yang beraktivitas berbeda mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap suatu ekosistem pantai.

Secara umum telah ada kebijakan secara nasional yang sesuai dengan SK Presiden Nomor 32 Tahun 1989, yang menetapkan lebar jalur sempadan pantai. Dalam keputusan ini areal pantai di atas shoreline yaitu selebar antara 150-200 meter dari shoreline ke arah barat. Areal ini ditetapkan sebagai kawasan lindung. Ini berarti bahwa areal 150-200 meter ini menjadi public beach yang melarang siapapun untuk membangun fasilitas wisata. Kawasan lindung pantai ini ditetapkan pemerintah untuk tujuan konservasi dan proteksi lingkungan. b. Pengembangan aspek wisata alam Di areal pantai dapat dibagi tiga macam kegiatan wisata yaitu :

- a. Surface activities, aktivitas wisata yang dilaksanakan di permukaan air pantai. Aktivitas ini antara lain berperahu, ski air dan berselancar.
- b. Contact activities, aktivitas wisata yang dilaksanakan, dengan wisatawan kontak dengan air. Aktivitas yang demikian antara lain berenang, scuba diving, mandi dan snorkeling.
- c. Littoral activities, aktivitas berwisata di daratan yang dilakukan oleh wisatawan. Aktivitas berwisata alam yang banyak dilakukan adalah berjemur di bawah sinar matahari, piknik dan berjalan-jalan santai.

Sustainable Tourism Pada dasarnya sustainable tourism atau pariwisata yang berkelanjutan merupakan sebuah implementasi dari Bruntland report yang merupakan sebuah landasan bagi sustainable development dimana pariwisata merupakan salah satu dari industri yang memiliki peran besar dalam pelestarian lingkungan, hal ini dikarenakan pariwisata merupakan industri jasa yang menggunakan daya tarik alam atau kebudayaan sebagai salah satu produk. seperti yang dikemukakan oleh Murphy dan Price (2005: 168) “Tourism’s interest in sustainable development is logical given that it is one industry that sells the environment, both physical and human, as its product”. Namun pariwisata sebagai industri tidak lepas dari beberapa fakta yang dapat mengganggu keberlangsungan pelestarian lingkungan yang seharusnya menjadi permasalahan penting dalam perkembangan pariwisata itu sendiri. McKercher (Ritchie dan Crouch, 2003: 34)

2.4 Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Pariwisata

2.4.1 Peran Dinas Pariwisata

Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam lingkungan masyarakat yang harus dilakukan oleh masyarakat yang berupa tuntutan-tuntutan perilaku masyarakat dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran dapat diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah atau isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan peran, oleh

karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role accupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau bertindak, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas, (Dewi Wulan Sari, 2009: 243).

Sedangkan menurut Soekanto Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Disamping itu juga peran sosial adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Seseorang dapat dikatakan berperan jika dia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat, (Soekanto, 1990: 243). Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan, pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi, penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi, peran digunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsive dan responsible.

d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran digunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian consensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan.

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seorang dalam masyarakat (social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- c. Peran factual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
- d. Menurut Siagian pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan

hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (legal state), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (welfare state), (Siagian, 1992: 128).

Disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Davey memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintahan, antara lain pertama sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya.⁴⁹ Kedua, fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan. Ketiga, fungsi pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Keempat, fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka. Kelima, fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan, (Davey, 1998: 21).

Pitana dan Gayatri mengemukakan pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya sebagai⁵⁰ :

- a. Motivator, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan

sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.

- b. Fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata kabupaten Pesisir Barat. Adapun pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.
- c. Dinamisator, dalam pilar good governance, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergikan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata, (Pitani, 2005: 95).

Ada tiga hal yang mendasar yang dianggap penting mengapa perlu adanya organisasi pariwisata yang efektif pada suatu daerah:

- a. Adanya penyebaran arus lalu lintas pariwisata ke arah luar dari pusat pariwisata yang menyebabkan ketidak siapan daerah untuk memberikan fasilitas dan kenyamanan yang memuaskan bagi wisatawan.
- b. Meningkatnya kebutuhan daerah, sehingga industri Pariwisata diharapkan bisa menjadi katalisator pembangunan dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga memerlukan suatu organisasi yang dapat diandalkan mengelola pariwisata sebagai suatu industri.

- c. Kebutuhan wisata yang dimiliki setiap orang menyebabkan pariwisata semakin berkembang pesat. Sehingga diperlukan organisasi pariwisata yang dapat meningkatkan pelayanan kepada wisatawan yang datang dan berkunjung pada suatu daerah, (Yudianti, 2014:21).

Ketiga hal itu mempunyai implikasi penting bagi pembangunan fisik. Selain fisik, maka koordinasi dan manajemen organisasi pariwisata sangat diperlukan demi terwujudnya pariwisata yang profesional dan bias memberikan kepuasan terhadap wisatawan. Terkadang ada destinasi pariwisata disuatu daerah yang sangat potensial, tetapi organisasi pariwisata tidak mampu mengolah dengan baik sehingga destinasi pariwisata tersebut akan kurang oleh wisatawan. Disinilah peran organisasi Pariwisata Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dapat memainkan peran penting, terutama melakukan koordinasi bagi pembangunan daerah dapat menjadi kenyataan dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut.

Kegiatan pokok yang dilakukan oleh suatu organisasi pariwisata diantaranya adalah :

- a. Melakukan koordinasi dalam menyusun strategi pengembangan dan perencanaan pemasaran pariwisata di daerahnya dengan melibatkan pihak-pihak terkait dengan kegiatan pariwisata di daerah itu sendiri.
- b. Mewakili daerah dalam pertemuan-pertemuan yang menyangkut kepentingan pengembangan pariwisata, baik di tingkat nasional maupun internasional.

- c. Mendorong pembangunan fasilitas dan kualitas pelayanan yang sesuai dengan selera wisatawan yang terdiri dari bermacam-macam segmen pasar .
- d. Menyusun perencanaan pemasaran dengan mempersiapkan paket-paket wisata yang menarik bersama dengan para perantara meningkatkan kualitas pelayanan dan penyebarluasan informasi kepada wisatawan secara periodik, (Yudianti, 2014:22).

Organisasi pariwisata di daerah sangat ideal jika dapat menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPA) yang diharapkan dapat dijadikan pedoman pengembangan dan perencanaan pemasaran strategi bagi daerah tersebut sebagai daerah tujuan wisata yang diharapkan lebih banyak wisatawan berkunjung ke daerah tujuan wisata yang diharapkan lebih banyak wisatawan berkunjung di daerah tersebut. Organisasi yang telah diberikan wewenang dalam pengembangan pariwisata di wilayahnya harus dapat menjalankan kebijakan yang paling menguntungkan bagi daerah dari wilayahnya karena fungsi dan tugas organisasi pariwisata pada umumnya adalah :

- a. Berusaha memberikan kepuasan bagi wisatawan dengan segala fasilitas dan potensi yang dimiliki.
- b. Melakukan koordinasi diantara bermacam-macam usaha, lembaga, instansi yang bertujuan untuk mengembangkan industri pariwisata.
- c. Mengusahakan dan memasyarakatkan pengertian pariwisata pada orang banyak, sehingga mereka mengetahui untung dan ruginya bila pariwisata dikembangkan sebagai suatu industri.

- d. Mengadakan program riset yang bertujuan untuk memperbaiki produk wisata dan pengembangan produk- produk baru guna dapat menyesuaikan pasaran di waktu yang akan datang.
- e. Menyediakan semua perlengkapan dan pasilitas untuk kegiatan pariwisata.
- f. Merumuskan kebijakan tentang pengembangan kepariwisataan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara teratur dan berencana.

Adanya Undang- Undang No 32 Tahun 2004 menyebabkan adanya pendelegasian dan pengaturan sektor-sektor tertentu pada satuan tingkat daerah, bigitu pula dengan bidang pariwisata, organisasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang pariwisata adalah Dinas Pariwisata. Secara garis besar peran Dinas Pariwisata adalah melakukan tugas pamerintah dengan mengelola pariwisata yang ada disuatu daerah. Secara spesifik adalah memberdayakan masyarakat untuk bersama mengembangkan pariwisata yang ada di daerah. Berdasarkan teori yang dikemukakan para ahli maka peneliti bias menyimpulkan bahwa peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat mencakup pendorong bagi masyarakat lokal agar senantiasa mendukung perkembangan pariwisata diwilayahnya (motivator), penyediaan fasilitas pendukung pariwisata (fasilitator), kerjasama yang sinergis dengan berbagai stakeholder pariwisata (dinamisator).

2.4.2 Mengembangan Pariwisata

Pengertian pengembangan menurut J.S Bududu dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah cara atau hasil kerja mengembangkan, sedangkan mengembangkan berarti membuka,memajukan,menjadikan maju dan bertambah baik. Agar dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan ,ada tiga hal yang

diperlukan di perhatikan dalam pengembangan suatu daerah menjadi daerah tujuan wisata, antara lain :

- a. Daerah tersebut harus mempunyai something to see yaitu harus mempunyai objek wisata dan atraksi wisata, yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain.
- b. Di daerah tersebut harus mempunyai something to do harus banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, dengan tersedia fasilitas yang membuat wisatawan betah ditempat tersebut.
- c. Di daerah itu juga harus tersedia something to buy yaitu berupa souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke asal masing-masing. Selain itu juga harus tersedia seperti money charger, bank, kantor pos, dan lain sebagainya, (Sondakh, 2010: 43).

2.4.3 Faktor Pendorong Pengembangan Pariwisata

Sumber kepariwisataan (*tourism resources*) biasa juga disebut modal kepariwisataan (*tourism assets*). Daerah atau tempat akan menjadi tujuan wisata kalau kondisinya sedemikian rupa, sehingga ada yang dikembangkan dan menjadi atraksi wisata. Apa yang dikembangkan menjadi atraksi wisata itulah yang disebut modal atau sumber kepariwisataan (*tourism resources*). Modal kepariwisataan ini mengandung potensi untuk dikembangkan menjadi atraksi wisata, atraksi wisata itu sudah tentu harus komplementer dengan motif perjalanan wisata. Maka untuk menentukan potensi kepariwisataan disuatu daerah harus berpedoman apa yang dicari wisatawan. Menurut Joyo Suharto Modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan itu ada tiga, yaitu :

a. Modal dari potensi alam

Maksud alam disini yaitu alam fisik, fauna dan floranya. Meskipun seabagai atraksi wisata ketiganya salalu berperan bersama. Bahkan biasanya juga bersama-sama dengan modal kebudayaan dan manusia, akan tetapi tentu ada salah satu modal yang menopang peting perannya. Alam menarik bagi wisatawan karena:

1. Banyak wisatawan tertarik oleh kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan dialam terbuka.
2. Dalam kegiatan pariwisata jangka pendek , pada akhir pekan atau dalam masa liburan, orang sering mengadakan perjalanan sekedar untuk menikmati pemandangan atau suasana pedesaan atau kehidupan diluar kota.
3. Banyak juga wisatawan yang mencari ketenangan ditengah alam iklimnya yang nyaman, suasananya tentram, pemandangannya bagus dan terbuka luas.
4. Ada juga wisatwan yang menyukai tempat- tempat tertentu dan setiap kali ada kesempatan untuk pergi mereka kembali ke tempat-tempat tersebut.
5. Alam juga sering menjadi bahan studi untuk wisatawan budaya,khususnya widya wisata.

b. Modal dari potensi kebudayaan

Maksud dari kebudayaan disini adalah kebudayaan dalam arti luas, tidak hanya meliputi kebudayaan tinggi seperti kesenian atau kehidupan dikeraton dan sebagainya, akan tetapi meliputi juga adat istiadat dan segala

kebiasaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Modal kebudayaan ini penting untuk menarik wisatawan tamasya agar mereka menikmati kebudayaan ditempat itu. Wisatawan tamasya (*pleasure tourist*) hanya tinggal disuatu tempat selama masih ada pemandangan lain, jadi harus ada banyak atraksi untuk menahannya cukup lama disuatu tempat. Akan tetapi juga dapat diharapkan akan ada wisatawan rekrasi, yang menghabiskan waktu senggangnya ditengah-tengah masyarakat dengan kebudayaan yang menarik.

c. Modal dari potensi manusia

Manusia dapat menjadi atraksi wisata dan menarik kedatangan wisatawan bukan hal yang luar biasa, meskipun gagasannya akan membuat orang tersentak, sudah tentu manusia sebagai atraksi wisata tidak boleh kedudukannya begitu direndahkan sehingga kehilangan martabatnya sebagai manusia.

2.4.4 Faktor Penghambat Pengembangan Pariwisata

Selain masalah konsep pengembangan sebuah objek agrowisata, masalah didalam pengelolaan agrowisata juga perlu dicarikan jalan keluarnya, berikut ini ada beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian diantaranya :

a. Potensi yang belum dikembangkan sepenuhnya

Potensi agrowisata yang besar tersebar diwilayah Indonesia hingga saat ini belum dikembangkan sepenuhnya. Hal ini disebabkan masih terbatasnya jangkauan dan kemampuan agrowisata. Selain itu, data mengenai potensi objek agrowisata belum dimiliki dan belum ada inventrisasi objek agrowisata yang telah ada. Permasalahan lain yang dihadapi dalam pengembangan agrowisata

yakni belum siapnya jaringan transportasi ke lokasi,,belum memadai fasilitas ditempat tujuan, serta disiapkannya lokasi tersebut untuk menjadi daerah pertanian sekaligus daerah wisata.

b. Promosi dan pemasaran agrowisata yang masih terbatas

Hingga saat ini usaha untuk memperkenalkan potensi agrowisata Indonesia kepada wisatawan domestic ataupun mancanegara masih terbatas. Indonesia belum mampu menyediakan dana yang cukup besar untuk promosi maupun informasi kepariwisataan. Apabila dibandingkan Dengan Negara ASEAN yang lain, dana promosi pariwisata di Negara kita ternyata relative rendah. Selaian dana promosi, serana promosi juga masih kurang, usaha yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memanfaatkan jalur-jalur promosi yang memungkinkan. Jalur promosi tersebut berupa kerjasama dengan biro perjalanan pariwisata internasional, lembaga pariwisata pemerintah, penggunaan media audio visual, media cetak, dan lain-lain.

c. Kurangnya kesadaran pengunjung terhadap lingkungan

Pengunjung yang datang ketempat wisata berasal dari berbagai usia dan kalangan yang mempunyai tingkah laku yang berbeda. Sebagian pengunjung memang mempunyai kesadaran namun sebagian lainnya kurang berperilaku baik. Sejumlah dana yang telah dikeluarkan oleh pengunjung sebagai bea masuk kadang dijadikan dasar bahwa pengunjung berhak melakukan apa saja yang disukainya. Kondisi ini menjadi problem tersendiri bagi pengelola yang perlu diantisipasi.

d. Koordinasi yang belum berkembang

Kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam pengembangan wisata. Untuk itu perlu adanya koordinasi yang baik antara semua pihak yang berkepentingan. Kurangnya koordinasi antar pihak yang bertanggung jawab mengelola seringkali mengakibatkan perkembangan agrowisata tidak dengan konsep yang seharusnya. Hal ini menyulitkan memantauan dan pengawasan terhadap pengembangan agrowisata selanjutnya.

e. Terbatasnya kemampuan manajerial di bidang agrowisata

Manajerial merupakan komponen yang dibutuhkan untuk semua kegiatan usaha. Manajemen yang baik dalam hal promosi, perencanaan, pemasaran maupun pengembangan produk agrowisata sangat mempengaruhi keberhasilan upaya peningkatan atas pengunjung. Namun, pengelolaan agrowisata Indonesia masih sangat terlihat kurang profesional. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya kuantitas maupun kualitas dari tenaga kerja yang ada sehingga mereka kurang menguasai permasalahan.

f. Belum adanya peraturan yang lengkap

Peraturan dan tata cara pengusahab agrowisata hingga saat ini belum digarap secara utuh, peraturan objek ini menarik peluang besar untuk dikembangkan secara lebih luas perlu kiranya dibuat pedoman sebagai acuan yang digunakan semua pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan wisata.

2.5 Penelitian Terdahulu

TABEL 2
PENELITIAN TERDAHULU

| NO | JUDUL, NAMA PENULIS, TAHUN | METODOLOGI PENELITIAN | HASIL PENELITIAN | PERSAMAAN DAN PERBEDAAN |
|----|--|--------------------------|--|--|
| 1. | Peran Wisata Bahari Dalam Meningkatkan Omset Pemda Dan Ekonomi Masyarakat Simeulue”, Ojiselvia, 2019 | Deskriptif Kualitatif | Dari penelitian ini diketahui bahwa secara umum peran wisata bahari berdampak positif bagi masyarakat dan pemda setempat. Pernyataan masyarakat mengindikasikan terjadinya peningkatan dari segi pendapatan dan usaha yang berkaitan dengan kegiatan wisata di Kabupaten Simeulue. Selain itu kegiatan wisata menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar bagi masyarakat lokal maupun masyarakat dari luar daerah Kabupaten Simeulue. Peningkatan pendapatan juga | Persamaan adalah peran wisata bahari dalam meningkatkan omset Pemerintah Daerah. Perbedaannya penelitian sekarang khusus meningkatkan pendapatan asli daerah dalam bidang wisata bahari Kabupaten Aceh Selatan |

| | | | | |
|----|--|-----------------------|--|--|
| | | | terjadi pada penerimaan daerah, terutama dari sektor perdagangan, hotel, restoran dan resort. Dengan demikian perlu adanya pembenahan terhadap objek wisata bahari yang berlangsung di Kabupaten Simeulue dengan tujuan untuk meningkatkan minat dan daya tarik wisatawan sehingga Kabupaten Simeulue tetap terkenal dengan objek-objek wisata yang dimilikinya. | |
| 2. | Peranan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung, Muzakir, 2018 | Deskriptif Kualitatif | Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, jumlah hotel, jumlah restoran, dan jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh signifikan. Sedangkan, jumlah objek wisata tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, Karena masih banyaknya objek wisata yang dikelola oleh masyarakat dan belum | Persamaan adalah tentang peranan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah. Perbedaannya penelitian sekarang khusus meningkatkan pendapatan asli daerah dalam bidang wisata bahari Kabupaten Aceh Selatan. |

| | | | | |
|---|--|-----------------------|--|---|
| | | | sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah. | |
| 3 | Peranan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo, Ahmad, Nurlinda, Musfata Muhani, 2012 | Deskriptif Kualitatif | Hasil penelitian mengenai peranan sector pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. Menyatakan bahwa jumlah pendapatan sector pariwisata mengalami peningkatan dan penurunan tiap tahunnya disebabkan oleh factor jumlah wisatawan yang tidak berdasarkan hasil analisis regresi sederhana diperoleh koefisien korelasi antara retribusi pariwisata dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo sebesar 70%. Pengaruh ini menunjukkan bahwa diantara kedua variabel memiliki hubungan kuat dan positif. | Persamaannya adalah untuk melihat peranan sector wisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Perbedaannya penelitian sekarang khusus meningkatkan pendapatan asli daerah dalam bidang wisata bahari Kabupaten Aceh Selatan. |

Sumber : Pengelolaan Peneliti (2022).

2.6 Kerangka Berpikir Penelitian

GAMBAR 2
KERANGKA BERPIKIR PENELITIAN



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian yang berjudul Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Bidang Pariwisata Bahari Kabupaten Aceh Selatan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian dengan format kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan, berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007).

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menganalisis Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Bidang Pariwisata Bahari Kabupaten Aceh Selatan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2018), metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Pemilihan tempat penelitian Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan dilakukan secara *purposive* (sengaja). Penelitian lapangan akan dilaksanakan dengan antara bulan Desember 2022 sampai februari 2023.

3.3 Subjek/Informan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Bidang Pariwisata Bahari Kabupaten Aceh Selatan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Informan kunci : - Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan.
2. Informan utama : - Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan
- Bidang Pengembangan dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan
3. Informan tambahan : - Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh.
- Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan.
- Informan Masyarakat:
 1. Aldi Saputra
 2. Ansari

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitian melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya, data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertentu seperti laporan penelitian, jurnal dan lain-lain. Menurut Bungin (2007) metode pengumpulan data kualitatif yang paling independent terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah:

1. Observasi yaitu studi atau pengamatan tentang suatu permasalahan yang dilakukan secara langsung dan sistematis oleh peneliti. Observasi tentang Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Bidang Pariwisata Bahari Kabupaten Aceh Selatan
2. Wawancara (interview) dilakukan peneliti kepada Kepala Bidang Pariwisata Bahari Kabupaten Aceh Selatan, Kabid Bidang Pariwisata Bahari Kabupaten Aceh Selatan, Kasie Bidang Pariwisata Bahari Kabupaten Aceh Selatan, Staf Bidang Pariwisata Bahari Kabupaten Aceh Selatan, 5 Orang Warga Masyarakat.
3. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti dalam bentuk catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Bidang Pariwisata Bahari Kabupaten Aceh Selatan.

3.5 Definisi Konsep dan Definisi Operasional

3.5.1 Definisi Konsep

Konsep dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan indikator yang diteliti. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

a. Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata merupakan perangkat daerah di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh yang mengurus urusan pemerintah bidang pariwisata dan bidang kebudayaan.

b. Pendapatan Asli Daerah

Adalah Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

c. Bidang Pariwisata Bahari,

Adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang Laut, dan wisata bawah Laut.

3.5.2 Defenisi Operasional

Peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2012: 142-150) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, inovator,

modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu.

Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.
- b. Inovator, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (legitimacy) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konseptual, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.
- c. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan

mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.

- d. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.
- e. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

3.6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara dan dokumentasi) dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh.

Data kualitatif yang diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (dalam Jamaludin Ahmad, 2015) mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi:

a. Pengumpulan Data (*data collection*)

Data yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat pada catatan lapangan yang terdiri atas 2 bagian yaitu bagian deskriptif dan bagian reflektif. Pengertian catatan deskriptif yaitu catatan alami, (merupakan catatan mengenai apa yang disaksikan, didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh penelitian padanya penafsiran dan pendapat dari peneliti terhadap fenomena yang dialaminya). Catatan reflektif adalah catatan yang isinya kesan, pendapat, komentar serta tafsiran peneliti mengenai apa penemuan yang dijumpai. Selain itu merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya.

b. Reduksi Data (*data reduction*)

Selanjutnya setelah data terkumpul dibuat reduksi data, untuk menentukan data yang relevan dan mempunyai makna, memfokuskan data yang mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya melakukan penyederhanaan serta menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting mengenai hasil penemuan dan maknanya. Dalam proses reduksi data, hanya temuan data/atau temuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang di reduksi.

Sedangkan untuk data yang tidak ada kaitannya dengan masalah penelitian di buang. Atau dengan kata lain reduksi data dipakai untuk analisis yang mengarahkan, menggolongkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting dan mengorganisasikan data. Dengan begitu maka akan mempermudah peneliti untuk menarik sebuah kesimpulan.

c. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data bisa berbentuk tulisan, gambar, table dan grafik. Tujuan penyajian data untuk menggabungkan informasi sehingga bisa memberikan gambaran terhadap keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, supaya peneliti tidak mengalami kesulitan dalam penguasaan informasi secara baik dan menyeluruh dan bagian-bagian yang tertentu dari hasil penelitian. Maka dari itulah peneliti harus membuat naratif, grafik atau matrik untuk mempermudah penguasaan data atau informasi tersebut. Dengan cara seperti itu maka peneliti bisa tetap bisa menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang bisa membosankan. Hal seperti ini dilakukan karena data yang tersusun kurang baik dapat mempengaruhi peneliti dalam mengambil kesimpulan yang memihak dan dalam bertindak secara ceroboh dan tidak mendasar. Mengenai *display* data harus disadari sebagai bagian di dalam analisis data.

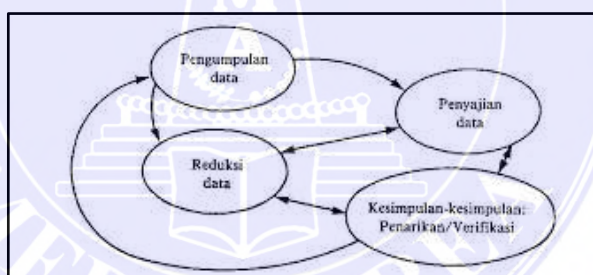
d. Penarikan Kesimpulan (*drawing/verification*)

Penarikan kesimpulan dilakukan selama berlangsungnya penelitian, seperti halnya proses reduksi data, sesudah data telah terkumpul memadai maka akan dapat diperoleh kesimpulan sementara, dan sesudah data benar-benar lengkap maka dapat di peroleh kesimpulan akhir. Mulai awal dari penelitian, peneliti

selalu ingin berusaha menemukan makna data yang terkumpul. Oleh sebab itu perlu untuk menemukan tema, pola, persamaan, hubungan, hipotesis, hal-hal yang sering muncul dan lain-lain. Awalnya kesimpulan yang diperoleh bersifat kabur, tentatif dan diragukan namun dengan bertambahnya data baik itu dari hasil observasi maupun wawancara dan dari diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian. Maka kesimpulan-kesimpulan tersebut harus di klarifikasikan dan diverifikasikan selama berlangsungnya penelitian. Berikut model metode penelitian menurut Miles dan Huberman :

Gambar 3.

Langkah-Langkah Analisis Miles dan Huberman



Sumber: Miles dan Huberman, 1992

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dan analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Bidang Pariwisata Bahari Kabupaten Aceh Selatan

a. Stabilisator

Peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan. Pendapatan asli daerah pada bidang wisata bahari di Kabupaten Aceh Selatan sebagai upaya pembangunan daerah juga sebagai salah satu bagian dari pembangunan Kabupaten Aceh Selatan yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

b. Inovator

Dalam memainkan peran selaku inovator, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi pra

kondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Pengembangan kawasan pariwisata bahari merupakan satu upaya pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam mengembangkan obyek wisata bahari yaitu dengan cara memaksimalkan kawasan-kawasan atau bagian-bagian yang terdapat pada obyek wisata bahari di Kabupaten Aceh Selatan.

c. Modernisator

Pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Aceh Selatan merupakan upaya yang dilakukan dengan mengidentifikasi keinginan atau kebutuhan wisatawan yang menjadi konsumen jasa pariwisata bahari, maka pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Dinas Pariwisata untuk terus melakukan pengembangan pariwisata khususnya wisata bahari untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

d. Pelopor

Selaku pelopor pemerintah Kabupaten Aceh Selatan harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.

e. Pelaksana Sendiri

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Dinas Pariwisata dalam melakukan promosi wisata bahari di Kabupaten Aceh Selatan melakukan koordinasi dengan berbagai

instansi lainnya. Tujuan dari peningkatan kordinasi antar instansi dan pihak swasta di lingkungan Kabupaten Aceh Selatan serta dinas di luar Kabupaten Aceh Selatan untuk mengadakan promosi pariwisata khususwa wisata Bahari. Kegiatan promosi ini juga bertujuan untuk menarik investor agar tertarik menanamkan modalnya di bidang pariwisata.

2. Hambatan Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Bidang Pariwisata Bahari Kabupaten Aceh Selatan

Hambatan Dinas Pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada bidang pariwisata Bahari Kabupaten Aceh Selatan antara lain :

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan masih belum siap terhadap perubahan yang terjadi dalam dunia pariwisata. Persepsi masyarakat masih negatif terhadap bisnis atau industri jasa pariwisata. Padahal perkembangan di bidang pariwisata tidak dapat lepas dari jasa hiburan yang mempunyai daya tarik bagi wisatawan. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan, karna yang menjadi keluhan utama wisatawan adalah sampah yang beserakan dimana-mana. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap minat wisatawan, karna kenyamanan suatu tempat wisata merupakan faktor utama dalam hal pelayanan wisata.

2. Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Angka jumlah pendidikan wilayah Aceh Selatan masih sangat minim. Sehingga kualitas SDM pun sangat minim. Buruknya atau rendahnya kualitas sumber daya pengelola usaha pariwisata akan berdampak rendahnya kualitas

manajemen pariwisata, mutu pelayanan yang akan berakibat pada penurunan jumlah wisatawan.

3. Keterbatasan Anggaran (dana)

Terbatasnya dana pasti akan mempengaruhi pengembangan pariwisata karena pengembangan yang dilakukan tidak maksimal di Kabupaten Aceh Selatan. Usaha pengembangan dalam sektor pariwisata maka Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan membutuhkan dana yang cukup besar, yaitu dana untuk pengembangan obyek wisata, sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pariwisata, sumber daya manusia pengelola pariwisata dan lain-lain. Dana merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung kegiatan kepariwisataan.

4. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana

Kondisi jalan dan angkutan transportasi umum antar kawasan wisata. Minimnya angkutan transportasi menjadi salah satu kendala untuk menjangkau wisatawan. Tidak bisa dipungkiri lagi kalau jalur transportasi yang ada di Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan daerah barat selatan Provinsi Aceh masih minimnya laju transportasi yang masuk ke Kabupaten Aceh Selatan berbeda dengan daerah Kabupaten/Kota lainnya di Aceh yang akses transportasinya lebih mudah karena menghubungkan ke Kota Banda Aceh dan Medan. Apabila akses masuk obyek wisata sangat sulit maka besar kemungkinan para wisatawan akan berkecil hati untuk mengunjungi obyek wisata yang ada di Kabupaten Aceh Selatan.

5. Kurangnya program kemitraan dengan pemerintah dan swasta

Kurangnya program kemitraan antar pemerintah dengan swasta terutama dalam permodalan atau investasi dan promosi maka akan menjadi kendala dalam hal pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan. Karna sebuah usaha tidak bisa terlepas dengan yang namanya investor. Semakin banyaknya investor yang atau yang menanamkan modal maka semakin baik pula terhadap pengembangan maupun pembangunan daerah, lebih khususnya untuk sektor pariwisata bahari.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan hendaknya meningkatkan jumlah anggaran Dinas Pariwisata agar upaya perbaikan bidang pariwisata Bahari di Kabupaten Aceh Selatan dapat lebih maksimal.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Dinas Pariwisata untuk terus melakukan pengembangan bidang pariwisata Bahari guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Selatan.
3. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dengan Dinas atau Instansi lain dalam bidang pariwisata bahari.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelina Sondakh, *Jendela Pariwisata*, Bandung: Kesaint Blanc, 2010.
- Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Budiharsono, Sugeng. 2009. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan lautan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Buku Adi, Isbandi Rukmianto, 2012, *Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Clark, J.R. 1996. *Coastal Zone Management Handbook*. Lewis Publishers. Boca Raton Florida, USA
- Dahl, Robert. 1994. *Analisa Politik Modern*. Bumi Aksara. Jakarta
- Davey, P. (2011). *At a Glance Medicine*. Jakarta: Erlangga
- Dahuri, R., 1999, *Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan Untuk Kesejahteraan*
- Fauzi, S. 2000. *Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir. Materi pada Seminar Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Secara Berkelanjutan*. Proyek Kerjasama IPB dengan The Papua New Guinea University of Technology
- Gibson ,Ivancevich, Donnelly, *Organisasi dan Manajemen, Perilaku Stuktur Proses*, Erlangga, Jakarta, 1997
- Indarti, I., & Wardana, D. S. (2013). *Metode Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Jones dan Westmacott, 1993*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Dewi Wulan Sari, *Sosiologi : Konsep dan Teori*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 1990.
- Siagan,S.P, *Organisasi Kepemimpinan & Perilaku Administrasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Davey, K.J, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Penerjemah Amanullah Dkk UI- Pers, 1998.
- G Pitani Dan Gayatri P. G, *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2005.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif. Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung

LAMPIRAN DOKUMENTASI



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/23

